

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Amin Insani¹, Sri Rahayu², Misni Erwati³

Universitas Jambi ¹²³

³Corresponding author: misniaja31@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 18/04/2023

Revisi pertama tanggal: 19/05/2023

Diterima tanggal: 04/06/2023

Tersedia online tanggal: 27/06/2023

ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator yang digunakan untuk memantau, mengukur, mengevaluasi, dan mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2019-2021. Sejumlah 33 sampel pada 11 Kabupaten/Kota diperoleh dengan teknik non probability sampling. Data sekunder diperoleh dari website resmi DJPK, BPS, dan BPK provinsi Jambi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan variabel dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun untuk variabel belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Kata Kunci: PAD, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, opini audit, kinerja keuangan pemerintah daerah

ABSTRACT

Local government financial performance is an indicator used to monitor, measure, evaluate, and achieve the implementation of effective and efficient regional financial management. The research aims to determine the effect of local original income, balancing funds, capital expenditure, economic growth, and audit opinions on the financial performance of district/city governments in Jambi Province for the 2019-2021 period. A total of 33 samples in 11 districts/cities were obtained using a non-probability sampling technique. Secondary data was obtained from the official websites of DJPK, BPS, and BPK Jambi province. The results showed that the variable of local original income had a positive influence on the financial performance of local governments and the variable of equalization funds had a negative influence on the financial performance of local governments, but for variables of capital expenditure, economic growth, and audit opinions did not affect the financial performance of local governments. The results of this study make an important contribution in efforts to improve government performance and services to the community.

Keywords: Original local government revenue, balancing fund, economic growth, audit opinion, local government financial performance

1. Pendahuluan

Otonomi daerah adalah hak yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk secara independen menciptakan peraturan lokal, merencanakan dan menerapkan kebijakan, serta mengatur keuangan wilayahnya. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan juga pembangunan di daerah, meminimalisir ketimpangan tiap wilayah, serta meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik yang ada di setiap daerah (Septariani & Asoka, 2022). Salah satu aspek pemerintahan daerah yang perlu diatur dengan seksama adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan penganggaran daerah, karena APBD adalah rencana kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Menurut aturan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah terkait rangka menjalankan tugas pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan nilai uang, serta semua jenis kekayaan yang bisa dimiliki oleh daerah dalam kaitannya tentang hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah serta pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikhendaki daerah tersebut (Halim & Kusufi, 2018). Sehubungan dengan hal ini, keuangan daerah menjadi bagian yang sangat perlu untuk di perhitungkan secara matang karena menjadi tonggak dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahun guna memberikan pelayanan dan kesejahteraan makasimal. Pencatatan, pengukuran, penilaian, dan pencapaian pengelolaan keuangan daerah dapat dimonitor melalui kinerja keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2019). Apabila kinerja keuangan pemerintah daerah dijalankan dengan baik dan benar maka akan baik juga dalam hal pengendalian keuangannya, baik dalam hal pengendalian pendapatan maupun belanjanya yang dilakukan oleh daerah tersebut. Oleh karenanya, kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki urgensi untuk diteliti karena akan berdampak bagi pemerintah daerah dan para pengguna lainnya yang memerlukan informasi mengenai hal ini.

Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah dengan menggunakan rasio keuangan daerah (Halim, 2018). Beberapa rasio yang dapat digunakan adalah: rasio kemandirian keuangan daerah, ataupun lainnya. Hasil perhitungan analisis rasio yang diterapkan pada APBD dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya keuangan. Pendapatan, belanja, pembiayaan, sumber daya manusia, dan kondisi makro daerah merupakan faktor penentu utama kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu sangat penting untuk meneliti faktor-faktor yang berpotensi memengaruhinya. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh data yang disajikan di laporan keuangan dan dijelaskan oleh rasio keuangan (Wahyudin dan Hastuti, 2020).

Hal-hal yang menjadi fenomena pada penelitian ini adalah adanya penurunan APBD, serta pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren penurunan pada kabupaten/kota di

Provinsi Jambi yang diakibatkan oleh adanya pandemi *Covid-19* yang menghantam Indonesia di awal Tahun 2020 yang kemudian mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan terlihat dalam kajian fiskal regional kementerian keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi 2020. Kajian tersebut menggambarkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah kabupaten/kota Provinsi Jambi tidak stabil, sebagai gambaran realisasi pendapatan asli daerah kota jambi yang pada Tahun 2019 menunjukkan 393,43 miliar turun cukup jauh menjadi hanya 355,67 miliar. Penurunan ini terjadi karena adanya penutupan pemasukan PAD yang berada di daerah, serupa tempat pembayaran pajak kendaraan, hotel, kafe, restaurant, ataupun tempat wisata, terutama di Kota Jambi yang sebagai kontributor paling besar PAD. Hal ini menunjukkan jika daerah di masih sangat mengharapkan pembiayaan yang diperoleh dari pemerintah pusat karena Provinsi Jambi memiliki keterbatasan dalam objek pajak yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Selain itu, potensi pajak dan retribusi daerah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.

Realisasi dana perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi juga menunjukkan hal yang sama yaitu cenederung terjadi penurunan yang cukup signifikan. Tertuang di kajian fiskal regional kementerian keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi 2020 bahwa hampir seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan realisasi dana perimbangan, sebagai gambaran pada Kabupaten Muaro Jambi realisasi dana perimbangan pada tahun 2019 mencapai 1045,45 miliar dan turun pada tahun 2020 yang hanya menjadi 857,50 miliar. Penurunan realisasi pada dana perimbangan juga diakibatkan oleh wabah *Covid-19* selama Tahun 2020 yang berdampak kepada menurunnya APBN pemerintah pusat dan kemudian berdampak kepada penurunan dana transfer dari pusat ke daerah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya.

Kajian fiskal regional DJPB Tahun 2020 juga memperlihatkan bahwa realisasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi rata-rata memperlihatkan adanya tren penurunan pada Tahun ini yang disebabkan oleh pandemi wabah *covid-19*. Rendahnya serapan belanja ini sangat memengaruhi keadaan perekonomian suatu daerah yang paling utama adalah tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks pengendalian keuangan pemda, belanja modal dianggap jadi indikator produktivitas penggunaan anggaran. Tujuan dari penggunaan anggaran belanja modal adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas publik serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi dikutip dari kajian fiskal regional kementerian keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi (2020), menyatakan bahwa pada tahun 2020 Provinsi Jambi ini mempunyai misi pengembangan di Tahun 2020 dengan topik “peningkatan daya saing daerah dengan memacu kualitas produk unggulan daerah”. Topik ini diangkat akibat adanya tren laju pertumbuhan ekonomi terus melamban serta melemahnya daya saing produk lokal guna berkompetisi dengan produk lainnya selain itu, terlihat adanya kontribusi yang rendah dari sektor industri, yang tercermin dalam penurunan partisipasi sektor tersebut terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dari tahun ke tahun, sebagai gambaran pada Kota Jambi sendiri di Tahun 2019 menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,73% dan merosot pada tahun berikutnya menjadi -

3,96%, data angka pertumbuhan ekonomi yang menurun ini diakibatkan oleh timbulnya pandemi *covid-19* mengakibatkan lambatnya konsumsi daripada rumah tangga, ekspor, serta investasi yang diakibatkan turunnya aktivitas ekonomi guna meminimalisir semakin tersebarnya virus *covid-19*.

Menurut Mahmudi (2019) auditor independen memiliki fungsi untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pemerintah daerah yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip dan kebijakan terkait pengelolaan daerah otonomnya akan tercatat di Laporan keuangan daerah (LKPD) sebagai hasil evaluasi atas laporan keuangan tahunan yang disampaikan dalam bentuk laporan audit. Opini audit adalah penilaian atas kepatuhan suatu entitas terhadap standar akuntansi yang berlaku serta kesesuaian informasi yang terdapat dalam laporan keuangannya (Halim, 2015). Opini audit dikatakan wajar apabila tidak terdapat keraguan atau ketidakjujuran dalam proses audit, serta seluruh informasi yang relevan telah dilaporkan secara lengkap dan transparan. Hal-hal diatas menjadi motivasi bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait variabel yang memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian terdahulu memberikan hasil yang beragam tentang kinerja keuangan pemerintah daerah. Ningrat & Supadmi (2019) kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pendapatan asli daerah, tetapi hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Machmud & Radjak (2018) yang menunjukkan bahwa secara parsial Variabel PAD tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Studi yang berbeda dilakukan oleh Wahyudin dan Hastuti (2020) menemukan dana perimbangan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggreni dan Artini (2019) yang menunjukkan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Studi lainnya dilakukan oleh Sukma et al. (2021) menemukan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Prastiwi dan Aji (2020) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang berbeda lainnya oleh Wulandari et al. (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Heryanti et al. (2019) dimana hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Studi yang berbeda dilakukan oleh Satria & Heny (2018) yang mengungkapkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Lestari & Hapsari (2020) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pada penelitian terdahulu ditemukan inkonsistensi dalam hasil penelitian mengenai pengaruh PAD, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemda, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali dan memberikan bukti empiris baru. Penelitian ini juga mengelaborasi kebaruan dari penelitian sebelumnya dengan menguji pertumbuhan ekonomi dan opini audit untuk

menindaklanjuti penelitian terdahulu (Sukma et al., 2021) untuk dianalisis pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti PAD, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan opini audit selama periode 2019-2021. Hasil penelitian ini berkontribusi guna memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan dalam efisiensi pengelolaan dan pelayanan masyarakat dan dimaksudkan agar bermanfaat sebagai elemen yang perlu direfleksikan dan diberikan masukan kepada pemerintah daerah di berbagai wilayah.

2. Kerangka Teoretis dan Pengembangan Hipotesis

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) mengemukakan adanya hubungan antara pemegang saham sebagai kepala dan pemimpin bisnis atau manajer sebagai agen. Teori ini beranggapan bahwa terdapat hubungan kerja sama antara dua pihak atas dasar suatu kontrak, yaitu antara pemberi hibah dan orang yang diberi kuasa untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Teori keagenan yang terkait dengan penelitian ini adalah bahwa pemerintah yang bertindak sebagai agen (manajemen pemerintah) harus menetapkan strategi tertentu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai aktor utama. Prinsipal, dalam hal ini pemerintah, tentu mengharapkan hasil kinerja yang baik dari agen-agennya. Salah satu aspek yang dapat mencerminkan hal ini adalah pelayanan keuangan yang baik dan laporan yang tepat. Kualitas laporan dan pelayanan keuangan yang baik sangat bergantung pada strategi yang diadopsi oleh pemerintah. Apabila pemerintah beroperasi secara efektif, masyarakat akan memiliki kepercayaan terhadapnya. Secara ringkas, pemilihan strategi akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat sebagai prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya keuangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung berjalannya sistem pemerintahan, layanan publik, dan pembangunan wilayahnya tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki kebebasan dalam menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat setempat dalam batas yang telah ditetapkan oleh peraturan (Dali et al., 2021). Menurut Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2022, PAD merujuk pada pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah melalui berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Penelitian Ningrat & Supadmi, (2019) pendapatan asli daerah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal mengindikasikan semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat. Hal tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan Andaresta et al. (2021) bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H_1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari pemberian dana perimbangan adalah guna membantu melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah, terpenting dalam meningkatkan jasa dan kemakmuran masyarakat untuk lebih baik (Budianto & Alexander, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Wahyudin dan Hastuti (2020) dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat membantu dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Digidewiseiso et al. (2022) menemukan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Aji (2020) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₂: Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja modal adalah biaya yang keluar guna memperoleh aset tetap ataupun aset lainnya yang memberikan suatu kegunaan lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Penelitian yang dilakukan Sari & Mustanda (2019) menyatakan belanja modal memiliki pengaruh positif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi alokasi anggaran untuk belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan semakin tinggi. Peningkatan belanja modal yang dilakukan oleh pemda akan berkontribusi pada kenaikan fasilitas serta potensi daerah, kemudian akan berdampak positif pada pendapatan daerah dan mendorong pencapaian kinerja keuangan pemda yang optimal. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sukma et al. (2021) menemukan bahwa pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah terjadi. Ketika alokasi dana anggaran dilaksanakan secara efektif, maka akan meningkatkan aset dengan manfaat jangka panjang. Hal ini berkontribusi dalam meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Dengan meningkatnya belanja modal, menciptakan pendapatan di berbagai sektor dan meningkatkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Argumentasi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Hapsari, 2020) bahwa ada pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan.

H₃: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi secara umum mengacu pada peningkatan kapasitas ekonomi suatu daerah terkait menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penggambaran mengenai perkembangan aktivitas ekonomi sebuah negara dapat memperoleh peningkatan *income* masyarakat di jangka waktu tertentu (Heryanti et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal ini, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan besarnya potensi daerah, maka semakin baik pula kinerja

keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Nasution & Panggabean (2018) yang menyatakan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan tingkat potensi ekonomi suatu daerah yang besar, dan ini dapat berkontribusi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

H₄: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Opini audit adalah kesimpulan yang diberikan oleh auditor mengenai kewajaran informasi yang telah diaudit. Dalam praktik auditing, dikatakan wajar apabila informasi tersebut bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya (Halim, 2015). Penelitian Satria dan Sari (2018) menunjukkan jika opini audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hadirnya opini audit sangat penting bagi pihak yang memerlukan atau yang ingin mengetahui terkait hasil laporan keuangan pemerintah daerah, bisa terlihat dari opini audit. Masyarakat juga bisa menilai opini audit yang telah diinformasikan melalui media elektronik atau media cetak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suandani & Banu (2021) menemukan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini audit pemerintah daerah yang semakin baik akan membuat masyarakat menjadi lebih percaya dengan pemerintah untuk mengelola keuangan pemerintah daerah.

H₅: Opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi. Sebanyak 9 Kabupaten dan 2 Kota digunakan sebagai populasi pada penelitian ini. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling total/sensus, sensus atau teknik pengambilan sampel yang disebut sampling total adalah teknik di mana seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel. Pada penelitian yang melibatkan populasi di bawah 100, sebaiknya dilakukan dengan metode sensus, yaitu dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai subjek yang dipelajari atau responden yang memberikan informasi. Penelitian akan menjadi lebih representatif dan akurat karena tidak terjadi bias dalam pengambilan sampel (Sugiyono, 2021). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumen atau perantara pihak lain yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data dalam penelitian didapat dari website resmi DJPK untuk LRA (<https://djpk.kemenkeu.go.id>), Laju Pertumbuhan Ekonomi di peroleh dari situs resmi BPS Kota Jambi (<https://jambi.bps.go.id>) dan Opini Audit diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi (<https://jambi.bpk.go.id>). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah serta variabel independen adalah Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan opini audit. Tabel 1 menunjukkan pengukuran variabel dalam penelitian ini.

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Pengukuran

No	Nama Variabel	Pengukuran	Referensi
1	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	$Rasio Kemandirian = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} \times 100\%}{\text{Pendapatan Transfer}}$	Mahmudi (2019)
2	PAD	Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.	Undang-undang nomor 23 tahun 2014
3	Dana Perimbangan	Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil (DBH) + Dana Alokasi Umum (DAU) + Dana Alokasi Khusus (DAK).	Undang-undang nomor 23 tahun 2014
4	Pertumbuhan Ekonomi	$\Delta PDRB_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan: $\Delta PDRB_t$ = Laju Pertumbuhan Ekonomi $PDRB_{t-1}$ = PDRB pada tahun sebelumnya</p>	Prawoto (2019)
5	Opini Audit	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = 5 Wajar Tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP) = 4 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) = 3 Tidak Wajar (TW) = 2 Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) = 1	Ditasari & Sudrajat (2020)

Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda, sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorellasi, uji heterokedastisitas. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Tujuan dari melakukan uji multikolinieritas adalah untuk menentukan apakah terdapat atau tidak terdapat hubungan yang saling berkaitan antara variabel independen (bebas) dalam suatu model regresi linear berganda (Ghozali, 2018). Uji autokorelasi tujuan guna memahami apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1) di model regresi linier. Jika terdapat korelasi tersebut, maka terdapat masalah autokorelasi. Autokorelasi terjadi ketika observasi yang berurutan sepanjang waktu saling terkait satu sama lain. Masalah ini muncul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bersifat independen antara satu observasi dengan observasi lainnya (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas berguna menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakselarasan variasi dari residual (*error*) pada suatu pengamatan ke pengamatan lain. “Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas” (Ghozali, 2018).

Model persamaan regresi yang di uji adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α = konstanta

β_1, \dots, β_5 = koefisien regresi model

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Dana Perimbangan

X_3 = Belanja Modal

X_4 = Pertumbuhan Ekonomi

X_5 = Opini Audit

ε = *error term model*

Penelitian ini memakai uji regresi linear berganda yang diantaranya adalah uji F, uji t dan uji koefisien determinasi (R^2). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi variabel terikat secara signifikan (Ghozali, 2018). Tujuan pengujian ini juga untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa baik atau seberapa besar proporsi variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebas dan berapa persen pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat, dimana R^2 nilainya antara $0 < 1$, sehingga semakin tinggi nilai R^2 maka variabel bebas semakin dekat hubungannya dengan variabel terikat. Oleh karena itu, model tersebut akan dianggap baik jika nilai R^2 mendekati satu, karena hal ini menandakan bahwa variabel-variabel bebas memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Ketika nilai R^2 mendekati satu, itu menunjukkan bahwa variabel bebas memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Ghozali, 2018).

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang statistik deskriptif dan hasil pengujian regresi linier berganda. Statistik deskriptif terdiri dari data nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata) dan standar deviasi sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) memiliki nilai *minimum* 29,05, nilai *maximum* 393,43, nilai *mean* 120,6173 dengan *standard deviation* 89,14044. Dana perimbangan (X_2) memiliki nilai *minimum* 557,17 dan nilai *maximum* 1307,92. *Mean* sebesar 909,3442 serta *standard deviation* sebesar 159,51661. Belanja Modal (X_3) mempunyai nilai *minimum* 103,30 dan nilai *maximum* 697,23. *Mean* sebesar 120,6173 serta *standard deviation* sebesar 126,00409. Pertumbuhan Ekonomi (X_4) memiliki nilai *minimum* -3,96 serta nilai *maximum* 6,61. *Mean* sebesar 2,6985 serta *standard deviation*

sebesar 2,75162. Terakhir, (X_5) Opini Audit 2021 memiliki nilai *minimum* 3,00 dan nilai *maximum* 5,00. *Mean* sebesar 4,9394 serta *standard deviation* sebesar 0,34816.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	29,05	393,43	120,6173	89,14044
Dana Perimbangan	557,17	1307,92	909,3442	159,51661
Belanja Modal	103,30	697,23	275,7148	126,00409
Pertumbuhan Ekonomi	-3,96	6,61	2,6985	2,75162
Opini Audit	3,00	5,00	4,9394	,34816
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	4,12	31,90	10,5676	7,13156

Ringkasan hasil pengujian asumsi klasik terdapat pada Tabel 3. Hasil pengujian normalitas menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) memperlihatkan bahwa data yang dipakai memiliki distribusi normal dengan nilai signifikansi *Asymp Sig* (2-tailed) adalah 0,200; yang lebih besar dari nilai alpha yang ditetapkan sebesar 0,05 (0,200 > 0,05). Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian ini, dapat disimpulkan jika model regresi penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai tolerance dari semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari semua variabel lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa dari semua variabel tidak terjadi masalah multikolinieritas. Uji autokorelasi menggunakan *run test* dapat disimpulkan bahwa diperoleh *Asymp. Sig.* (2-tailed) diatas 0,05 (0,078 > 0,05). Oleh karena itu, secara non parametik dapat dikatakan penelitian ini bebas dari gejala autokorelasi. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji spearman mendapatkan bahwa seluruh nilai signifikansi dari variabel bebas diatas adalah sebesar 0,05. Oleh karena itu, secara non parametik dapat dikatakan penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 2. Ringkasan Uji Asumsi Klasik

No	Uji Asumsi Klasik	Hasil Pengujian			Kesimpulan
1	Uji Normalitas Kolmogorov-smirnov	<i>Asymp Sig</i> (2-tailed)	0,200		Memenuhi asumsi normalitas
2	Uji Multikolinearitas VIF	VIF	PAD Dana perimbangan Belanja modal Pertumbuhan ekonomi Opini audit	1,366 2,498 2,561 1,072 1,110	Tidak terdapat masalah multikolinearitas
3	Uji Auto Korelasi <i>Run-Test</i>	<i>Asymp Sig</i> (2-tailed)	0,78		Bebas dari gejala autokorelasi
4	Uji Heteroskedastisitas Uji spearman	Sig (2-tailed)	PAD Dana perimbangan Belanja modal Pertumbuhan ekonomi Opini audit	0,435 0,777 0,99 0,957 0,918	Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

Pengujian analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memperlihatkan kekuatan hubungan antara satu variabel dependen dan variabel independen. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa konstanta (α) dengan nilai 6,711. Hal ini berarti jika variabel PAD (X1), Dana Perimbangan (X2), Belanja Modal (X3), Pertumbuhan Ekonomi(X4) dan Opini Audit (X5) diasumsikan nilainya 0, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara konstan bernilai 6,711. Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai t_{hitung} $72,407 > t_{tabel}$ 2,051 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa PAD secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ningrat dan Supadmi (2019) yang mengungkapkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menggali sumber kekayaan daerahnya secara merata, yang dapat menghasilkan peningkatan sumber kekayaan daerah itu sendiri dan berdampak pada terciptanya keseimbangan antara pendapatan dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjalankan kebijakan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan hal ini adalah upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi penerimaan yang ada di daerah tersebut. PAD pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan yang cukup baik dari sisi realisasinya yang sebesar 3.268, 26 Miliar (106,23%) dibanding tahun lalu (2020) yang hanya sebesar 2.643,43 Miliar (88,83%). Salah satu faktor pendukung pertumbuhan tersebut adalah dimulainya kembali aktivitas masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat mengunjungi taman hiburan dan tempat hiburan. Peningkatan pajak bahan bakar dan pajak penerangan umum sebagai sumber penerimaan mencerminkan keadaan ini. Kedua pajak ini mempunyai bobot cukup besar dengan proporsi masing-masing 20% dan 10% PAD (Tim KFR PPA II Kanwil DJPB Provinsi Jambi, 2021).

Tabel 3. Ringkasan Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Signifikansi
Konstanta	6,711	4,486	0,00
PAD	0,085	72,407	,000
Dana perimbangan	-,006	-6,785	,000
Belanja modal	-,001	-,888	,382
Pertumbuhan ekonomi	-,013	-,385	,703
Opini audit	-,122	-,453	,655
R Square	0,996		
Adjusted R Square	0,995		
Signifikansi F-test	0,000		

Seiring dengan penurunan jumlah kasus *covid-19* di Provinsi Jambi, peningkatan aktivitas masyarakat langsung memberikan dampak berupa kenaikan aktivitas tingkat hunian hotel. Hal ini juga akan berdampak langsung karena pajak hotel merupakan salah

satu yang terbesar secara regional di Provinsi Jambi. Sementara itu, sumber utama masih terutama berasal dari pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kedua pajak ini sama-sama memiliki bobot 25 sampai 20% dalam PAD. Besaran pajak kendaraan ini memperlihatkan bagaimana kemampuan Jambi berangsur pulih seiring dengan meningkatnya perekonomian (Tim KFR PPA II Kanwil DJPB Provinsi Jambi, 2021). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik dapat tercermin dari pengelolaan pendapatan awal daerah yang baik, pemerintah daerah dapat menggunakan pendapatan awal daerahnya. Pendapatan awal yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat menjadi tolak ukur tingkat pencapaian serta kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mencapai kinerja setiap tahunnya. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Lestari dan Hapsari (2020) yang menjelaskan jika PAD tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD merupakan salah satu pilar utama kemandirian suatu daerah, karena berakar pada kegiatan perekonomian daerah. Jika pemerintah daerah tidak efektif dalam menemukan sumber-sumber kekayaan di daerahnya, maka tidak akan terjadi peningkatan sumber-sumber kekayaan daerah. Akibatnya, keselarasan antara pendapatan dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah tidak akan tercapai. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk memiliki kemampuan yang handal dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah guna meningkatkan PAD dan mencapai kinerja keuangan yang baik.

Berdasarkan uji statistik pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai $-t_{hitung} = -6,785 > -t_{tabel} = 2,051$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heryanti dkk. (2019) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti semakin tinggi dana perimbangan maka akan semakin menurun kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun sebab utama penurunan ini adalah penurunan dana perimbangan akibat rekonsentrasi anggaran pusat penanganan *covid-19*, hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami pengurangan dana perimbangan karena pengurangan APBN. Pemerintah Pusat yang kemudian berdampak kepada penurunan dana transfer dari pusat ke daerah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya. Pada tahun 2020, Pagu Dana Transfer masih mendominasi postur APBD dengan porsi sebesar 68,16%. Tingginya porsi dana transfer mencerminkan ketergantungan yang tinggi dari Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Kemudian, pada tahun tersebut juga terjadi pemangkasan alokasi dana transfer yang signifikan sebesar 636,76 Miliar rupiah untuk penanganan Covid-19. Selain terjadi penurunan alokasi dana, terdapat juga penurunan dalam pencapaian realisasi baik secara nominal ataupun persentase. Penurunan yang signifikan terjadi di realisasi DBH yang cuman mencapai 57,12% (Kajian Fiskal Regional Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, 2020). Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Anggreni dan Artini (2019) yang mengungkapkan jika dana perimbangan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemda yang berarti semakin tinggi Dana Perimbangan tidak diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian statistik pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai $-t_{hitung} = -0,888 < -t_{tabel} = 2,051$ dan nilai signifikansi sebesar $0,382 > 0,05$. Hal ini berarti Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Aji (2020) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan cukup besar di sektor belanja modal karena terjadi pemotongan pagu yang mulanya pada tahun 2019 berjumlah 4.818,82 Miliar yang kemudian menurun menjadi hanya 4.151,64 Milliar saja pada tahun 2020 dikarenakan fokus dan prioritas pemerintah bergeser dari pembangunan infrastruktur telah dialihkan ke upaya penanganan *Covid-19*, bahkan untuk realisasi belanja modal di tahun 2020 saja hanya mencapai 73,52% (3.052,41 Miliar) dari total pagu. Pengutamaan pemakaian APBN dan APBD, terkhusus belanja modal fisik, dialihkan atau difokuskan kembali pada belanja penanganan *covid-19*. Alasan lainnya adalah biaya tak terduga mengalami kenaikan terkuat tahun ini, sehingga terjadi penurunan pagu biaya investasi, namun kenaikan ini normal dan bisa dimaklumi karena diperlukan penerapan tanggap darurat *Covid-19*. Pihak berwenang setempat secara khusus diimbau untuk memberikan respon dan respon yang cepat guna mencegah penyebaran *Covid-19* dan juga mengobati mereka yang telah tertular (Tim KFR PPA II Kanwil DJPB Provinsi Jambi, 2020). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Digdowiseiso, dkk. (2022) bahwa belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berarti, semakin tinggi anggaran belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah, maka akan semakin tinggi kinerja keuangan yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah tersebut. Belanja modal mencakup pengeluaran untuk proyek jangka panjang dan investasi dalam aset tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan perabotan. Pengelolaan dan alokasi yang baik dari belanja modal akan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor dan mendorong produktivitas masyarakat yang tinggi serta peningkatan kesejahteraan yang tercapai.

Berdasarkan hasil pengujian statistik pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai $-t_{hitung} = -0,385 < -t_{tabel} = 2,051$ dan nilai signifikansi sebesar $0,703 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Heryanti, dkk. (2019) yang mengungkapkan jika pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dimana setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tidak selalu diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Hasil penelitian ini tidak searah dengan penelitian Wulandari dkk (2020) yang mengungkapkan jika pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan sebagian signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, bisa dikatakan jika semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang mewakili besarnya potensi daerah maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini beralasan, karena pandemi *covid-19* telah memperlambat konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi asing sehingga berimbas pada pengurangan kegiatan ekonomi untuk menekan penyebaran wabah *covid-19*. Pemerintah daerah dengan pendapatan yang

besar diharapkan mampu berkinerja dengan baik, namun dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menunjukkan potensi yang lebih besar di daerah, yang tidak selalu berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang drastis akibat hantaman dari wabah *covid-19*. Pada triwulan IV-2020, Perekonomian Provinsi Jambi mencapai PDRB sebesar Rp53,23 triliun berdasarkan harga berlaku (ADHB) dan Rp37,89 triliun berdasarkan harga konstan 2010. Dengan pencapaian tersebut, total PDRB Provinsi Jambi selama tahun 2020 mencapai 206.846 Miliar Rupiah. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 mengalami penurunan sedikit dibanding tahun 2019, dengan angka sebesar -0,46% atau mencapai 217.060 Miliar Rupiah. Bank Indonesia (BI) mengambil kebijakan guna menurunkan suku bunga BI *7-day Reverse Repo Rate* dengan tujuan mendorong investasi dan konsumsi masyarakat daripada menabung. Langkah-langkah ini sangat penting mengingat pertumbuhan ekonomi Jambi pada Tahun 2020 terdampak secara signifikan, sehingga pendorong diperlukan agar pemulihan dapat terjadi.

Berdasarkan pengujian statistik pengaruh opini audit secara terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa nilai $-t_{hitung} -0,453 < -t_{tabel} 2,051$ serta nilai signifikansi sebesar $0,655 > 0,05$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa opini audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Lestari dan Hapsari (2020) yang mengungkapkan jika opini audit yang semakin baik, seperti opini tidak bisa menjamin kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat bahwa semakin baik opini dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, maka semakin baik juga pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang tercermin dalam laporan keuangan. Namun, hasil penilaian opini tersebut tidak dianggap sebagai satu-satunya indikator prestasi bagi daerah.

Penyebab yang lainnya juga adalah dikarenakan opini audit hanyalah menilai tata kelola keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, apakah laporan tersebut dibuat sewajarnya sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak, bukan sebagai pedoman terkait pengelolaan keuangan daerah yang efektif atau tidak (Ditasari dan Sudrajat, 2020). Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Satria dan Sari (2018) yang menjelaskan jika opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan hadirnya opini audit, pihak-pihak yang tertarik atau ingin memperoleh informasi sejauh mana laporan keuangan pemerintah daerah telah mencapai tingkat maksimal atau belum dapat melihat opini audit BPK. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui opini audit yang telah dipublikasikan melalui berbagai media.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pendapatan asli daerah dan memberikan pengaruh positif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan memberikan pengaruh yang negatif kepada kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja modal, pertumbuhan ekonomi, dan opini audit memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengimplikasikan bahwa ketika pemerintah daerah terlalu bergantung kepada transfer dana dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian daerah akan sangat rendah dan

mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sehingga mencapai kinerja yang baik. Pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja keuangannya dan lebih meningkatkan potensi dan kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD, sehingga pemerintah daerah mengurangi transfer dari pemerintah pusat untuk mencapai kinerja yang optimal. Keterbatasan penelitian ini berkaitan dengan periode waktu 3 (tiga) tahun anggaran dan terbatas pada Kabupaten dan kota di Provinsi Jambi saja, sehingga penelitian mendatang dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih luas. Penelitian mendatang dapat mengkaji determinan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memakai data *time series* yang lebih panjang untuk meningkatkan *robustness* hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- Andaresta, H., K. Aswar & Ermawati. (2021). Pengaruh PAD, dana perimbangan, size pemerintah daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap kinerja keuangan daerah. *Korelasi (Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 2, 1614-1624
- Anggreni, N.K. & Artini, L.G.S. (2019). Pengaruh PAD, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8 (3), 1315 – 13458. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v8.i3.p6>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2023) Laju Pertumbuhan Ekonomi. Diakses 3 Maret dari <https://jambi.bps.go.id/>
- BPK Provinsi Jambi (2023). Opini Audit Bpk. Diakses pada 6 Maret dari <https://jambi.bpk.go.id/>
- Budianto & Alexander, S.W. (2021). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4 (4), 783-892.
- Dali, N., Akib, M., & Haisa, W. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 6 (1), 319 – 336. DOI: <http://dx.doi.org/10.33772/jak-uho.v6i1>
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, D. R. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Fair Value Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 4 (6), DOI: <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1150>
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh opini audit dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. *Inventory: Jurnal Akuntansi* 4 (2), 104-117.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th Ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2015). *Auditing: Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan* (5th Ed., Vol. 1). STIM YKPN.
- Halim, A. (2018). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah* (2nd Ed.). Salemba Empat.

- Halim, A., & Syam Kusufi, M. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4th Ed.). Salemba Empat.
- Heryanti, C.D., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8 (8).
- Anggreni, N.K. & Artini, L.G.S. (2019). Pengaruh PAD, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 8 (3), 1315 – 13458. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v8.i3.p6>
- Lestari, E., & Hapsari, W. D. (2020). Pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD), dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada pemerintahan daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018). *e-Proceeding of Management*, 7(2), 2743
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/Jas.V2i1.1106>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th Ed.). Stim Ykpn.
- Nasution, A.N., & Panggabean, F.Y. (2018). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Publik* 8 (1), 1-9.
- Ningrat, N.K., C. I., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal pada kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 683. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V29.I02.P15>
- Wulandari, Oktaviani, S., Thoyib, M., & Mubarok, M. H. (2022). Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(8), 1134–1143. DOI: <https://doi.org/10.46799/jst.v3i8.593>
- Peraturan Pemerintah. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A.W. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2013-2018). *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Prawoto, N. (2019). *Pengantar Ekonomi Makro* (Monalisa, Ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i08.p02>
- Satria, I.D., & Sari, H.P. (2018). Pengaruh wealth, intergovernmental revenue, leverage dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal At-Tasyri'* 10 (1), 9-21
- Septariani, J., & Asoka, R. (2022). Analisis laporan realisasi anggaran terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 162–180. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v17i02.512>
- Suandani, K. P., & Banu Astawa, G. P. (2021). Pengaruh opini audit, belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 12 (03), 728-739

- Sukma, D., Mustika Putri, A., Muhammad Ahyaruddin, 2021. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah daerah. *Jurnal Informasi Akuntansi dan Perpajakan*, 2(1), 36-44
- Tim Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb Provinsi Jambi. (2020). *Kajian Fiskal Regional Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi 2020*.
- Tim Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb Provinsi Jambi. (2021). *Kajian Fiskal Regional Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi 2021*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Ri. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.
- Wahyudin, I. & Hastuti (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.